

**CAPAIAN KINERJA INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2018-2023
S.D TRIWULAN IV TAHUN 2020**

PERANGKAT DAERAH: DINKOMINFO

NO	TUJUAN/SASARAN /PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI 2018	TARGET KINERJA					REALISASI KINERJA		CAPAIAN s.d 2020 (%)	STATUS			RUMUS IKPD	PENJELASAN IKPD	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT	REKOMENDASI
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020		TT	AT	UK					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	16	17	18	19	20	21	22	23	24
BIDANG : KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																				
		INDIKATOR																		
		Indek Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	%	2.04	2.5	2.75	3	3.25	3.5	2.82	3.61	100	TT			Penilaian pada evaluasi SPBE menggunakan metode tingkat kematangan (maturity level) untuk menilai: 1) Domain Kebijakan Internal SPBE; 2) Domain Tata Kelola SPBE; 3) Domain Layanan SPBE.	Indek SPBE adalah suatu nilai yang merepresentasikan tingkat kematangan (maturity level) dari pelaksanaan SPBE di instansi pusat dan pemerintah daerah untuk mewujudkan proses kerja yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagaimana amanat Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE dan Permenpan RB Nomor 5 tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi SPBE.	Kebutuhan yang tinggi akan penggunaan layanan SPBE Aplikasi semakin lengkap dan efektif, layanan sudah semakin baik dan didukung dengan beberapa SOP yang sudah ada	- masih sedikitnya kebijakan internal yang mendorong pelaksanaan SPBE - belum terdokumentasi dengan baik tata kelola SPBE - masih rendahnya anggaran untuk pengembangan TIK - sedikitnya SDM di bidang TIK - masih adanya beberapa sistem informasi yang belum terintegrasi	-Disusun kebijakan internal yang mendorong pelaksanaan SPBE -Memperbaiki pendokumentasian tata kelola SPBE
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	%	77.90	78.30	78.70	79.10	79.50	80.00	80.03	95.50	100	TT			Nilai Keterbukaan Informasi setiap tahunnya didapatkan melalui: 1. Tahap Penilaian Kelengkapan Informasi pada website Badan Publik; 2. Pengisian Self Assesment Quisionare (SAQ) 3. Verifikasi dan Klarifikasi hasil pengisian SAQ 4. Presentasi PPID Badan Publik 5. Uji Publik	Nilai Keterbukaan Informasi Publik (KIP) adalah nilai yang merepresentasikan kinerja dan kepatuhan Badan Publik terhadap Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang KIP. Penilaian menjadi kewenangan Komisi Informasi sesuai dengan amanat Undang-Undang KIP, untuk Badan Publik Pemerintah Kabupaten Temanggung menjadi kewenangan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah	-Semangat PPID Utama didorong dukungan dari seluruh stakeholder, baik PPID OPD, Kecamatan dan Desa. -Website dan dashboard PPID OPD, Kecamatan, Kelurahan, dan Desa sudah difasilitasi oleh Dinkominfo -Monitoring, evaluasi, dan pendampingan rutin dilaksanakan oleh PPID utama untuk menguatkan dan meningkatkan pemahaman serta kapasitas pelaku PPID	-Ketidakeimbangan jumlah anggaran dengan banyaknya badan publik yang menjadi tanggungjawab PPID Utama. -Seringnya pergantian pelaku/admin PPID pembantu yg mengakibatkan dibutuhkan pembinaan dari awal	Meningkatkan frekuensi pendampingan dengan PPID Badan Publik dan mempersiapkan pengumpulan dokumen-2 yang disampaikan ke publik di awal tahun
		INDIKATOR PROGRAM																		
1	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase PPID badan publik yang aktif	%	6.7	9	12	15	18	20	11.34	13.20	65.98		AT		Jumlah PPID badan publik yang aktif dibagi jumlah badan publik dikali 100%	Total PPID: 341, PPID aktif 45 (OPD, Kecamatan, Kel/Desa)	Pemahaman PPID Badan Publik, baik tingkat OPD, Kecamatan dan Desa yang semakin baik dalam mewujudkan transparansi publik.	Load pekerjaan yang cukup tinggi di PPID Badan Publik, sehingga pekerjaan yang terkait transparansi sering terabaikan.	Meningkatkan koordinasi, komunikasi dan sinergitas dengan PPID Pembantu Badan Publik serta meningkatkan frekuensi kegiatan move dan pendampingan dengan PPID Badan Publik.
		Jumlah PPID badan publik yang aktif								38	45									
		Jumlah PPID badan publik								335	341									
		Persentase kelompok informasi masyarakat yang aktif	%	5	10	15	20	25	30	15.63	15.63	52.08		AT		Jumlah KIM yang aktif dibagi jumlah KIM yang ada dikali 100%	Jumlah KIM 32, yang aktif 5 KIM (di Kec. Bulu dan Kecamatan Jumo)	Semangat masyarakat dalam turut serta mendesiminasikan dan meningkatkan literasi informasi.	Anggaran kegiatan dibatalkan (refocusing) untuk penanganan covid19	Meningkatkan frekuensi pendampingan kepada KIM yang sudah terbentuk secara lebih intensif dan menyelenggarakan kegiatan diseminasi lebih terfokus.
		Jumlah KIM yang aktif								5	5									
		Jumlah KIM								32	32									
		Persentase kepatuhan Lembaga Penyiaran Publik (LPP) terhadap	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	TT			Jumlah LPP yang patuh terhadap norma siaran dibagi jumlah LPP dikali 100%	LPL (Pemkab) 1, LPS (swasta) 5, LPK (Komunitas) 1, LPPL TV 1	Pemahaman dan kepatuhan merata insan penyiaran terhadap P3 (Pedoman Program Siaran) dan SPS (Standar Program Siaran)	Anggaran kegiatan dibatalkan (refocusing) untuk penanganan covid19	Meningkatkan kerjasama dengan LP di Kabupaten Temanggung dengan mengadakan kegiatan bersama

NO	TUJUAN/SASARAN /PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI 2018	TARGET KINERJA					REALISASI KINERJA		CAPAIAN s.d 2020 (%)	STATUS			RUMUS IKPD	PENJELASAN IKPD	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT	REKOMENDASI		
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020		TT	AT	UK							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
		norma siaran	Jumlah LPP dengan kategori patuh										8	8								
			Jumlah LPP										8	8								
2	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase ketersediaan akses internet publik	%	41	80	90	100	100	100	68.33	73.33	73.33		AT		Jumlah ketersediaan akses internet di area publik dibagi jumlah area publik dikali 100%	Jumlah area publik 60 area, yang sudah tersedia akses internet 41 area.	Area publik seperti puskesmas secara mandiri mengadakan peralatan akses point untuk publik, sebagian besar lokasi sudah terhubung jaringan kominfo	Keterbatasan bandwidth yang akan didistribusikan di ruang publik, keterbatasan anggaran serta sapsras pendukung di area publik (kelistrikan dan keamanan alat)	Direncanakan pembangunan akses internet publik berbasis fiber optik dengan bandwidth terpisah dari bandwidth internet PD		
			Jumlah Area publik Yang terhubung jaringan dari Kominfo										41	44								
			Jumlah Area publik										60	60								
		Persentase ketersediaan jaringan intranet	%	59.49	100	100	100	100	100	80.25	82.03	82.03		AT		Jumlah OPD yang menggunakan jaringan intranet dibagi jumlah OPD dikali 100%	Jumlah OPD, Desa/Kel : 395, Jumlah yang sudah terhubung 317	Cost sharing pengadaan peralatan jaringan di beberapa desa yang didukung dengan alokasi dana untuk pembelian aset perlatan jaringan yang dianggarkan dari APBDes	Sebagian desa ada yang memiliki akses internet dari penyedia jasa lain karena sebagian dimanfaatkan untuk kegiatan usaha	Penambahan anggaran untuk pengadaan repeater yang dapat diakses untuk desa-desa		
			Jumlah OPD,UPT (eks UPT) dan Desa/Kel. Yang terhubung jaringan dari Kominfo										317	324								
			Jumlah OPD,UPT (eks UPT) dan Desa/Kel.										395	395								
		Persentase sistem informasi yang terintegrasi	%	7	15	20	30	40	50	13.23	16.17	32.35			UK	Jumlah sistem informasi yang sudah terintegritas dibagi jumlah sistem informasi yang ada dikali 100%	Jumlah Total SI: 500, SI terintegrasi : 76	Kesadaran akan keamanan jaringan dan kemudahan yang diperoleh dari integrasi jaringan, PD secara mandiri telah memiliki akses internet dengan berlangganan ke ISP	Belum adanya standar baku pembangunan dan pengembangan sistem informasi, serta belum terukupinya peralatan jaringan di seluruh PD	Pembangunan jaringan berbasis fiber optik untuk integrasi jaringan seluruh PD		
			Jumlah sistem informasi terintegrasi										61	82								
			Jumlah sistem informasi										461	507								
		Persentase sistem informasi yang berfungsi optimal	%	38	40	45	50	55	60	40.13	52.27	87.11		AT		Jumlah sistem informasi yang berfungsi optimal dibagi jumlah sistem informasi yang ada dikali 100%	Total SI: 500, SI berfungsi optimal : 258	Meningkatnya kemauan dan kemampuan dalam pengelolaan sistem informasi	Belum adanya standar baku pengelolaan sistem informasi, serta terbatasnya SDM di bidang TIK	Penambahan SDM TIK dan diterbitkannya regulasi yang mengatur pengelolaan sistem informasi yang baku		
			Jumlah sistem informasi berfungsi optimal										185	265								
			Jumlah sistem informasi										461	507								
	Jumlah Indikator sasaran	2	Rata rata capaian kinerja sasaran										100.00	2	0	0						
	Jumlah Indikator Program	7	Rata rata capaian kinerja program										70.41	1	5	1						
	Jumlah IKPD	9	Rata rata capaian kinerja Bidang Komunikasi dan informatika										85.21	3	5	1						

BIDANG : STATISTIK

INDIKATOR TUJUAN

NO	TUJUAN/SASARAN /PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI 2018	TARGET KINERJA					REALISASI KINERJA		CAPAIAN s.d 2020 (%)	STATUS			RUMUS IKPD	PENJELASAN IKPD	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT	REKOMENDASI					
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020		TT	AT	UK										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	16	17	18	19	20	21	22	23	24					
3	Program Pengembangan Data Statistik	Cakupan ketersediaan data makro daerah	%	87	100	100	100	100	100	100	100	100	TT			Jumlah data makro daerah yang tersedia dibagi 5 dikali 100%	Data makro yang dibutuhkan meliputi data pertumbuhan ekonomi, PDRB Perkapita, Inflasi, Nilai Tukar Petani, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) = 5 data	Sinergitas kerja sama Dinkominfo dan BPS Temanggung dan Ketersediaan data di tiap OPD	Beberapa data statistik yang terkumpul tidak tepat waktu karena ada beberapa perubahan rekonsiliasi dari provinsi, sementara OPD tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan pendataan secara mandiri (menunggu dari BPS).	Pembenahan penjadwalan kegiatan pengumpulan data statistik.					
Jumlah data makro yang tersedia										5	5														
Jumlah kebutuhan data makro										5	5														
Jumlah Indikator Program			1	Rata rata capaian kinerja program								100.00	1	0	0										
Jumlah IKPD			1	Rata rata capaian kinerja Bidang statistik								100.00	1	0	0										
BIDANG : PERSANDIAN																									
4	Program Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Tingkat penilaian persiapan/pengelolaan resiko keamanan informasi	%	8.3	1	1	1	1	1	1.08	0.43	43.20		AT		Prosentase sistem elektronik yang telah diidentifikasi kerentanan dan risikonya dibagi jumlah sistem elektronik yang ada di OPD	Menjamin keamanan lalu lintas komunikasi dan infrmasi milik pemerintah daerah	Adanya kerjasama dengan Badan Siber dan Sandi Negara serta Dinas Kominfo Provinsi Jawa tengah yang bersedia melakukan assesment keamanan informasi di Kabupaten Temanggung	Belum bisa melakukan assesment secara mandiri karena keterbatasan sumber daya, Anggaran kegiatan dibatalkan (refocusing) untuk penanganan covid19	Penyediaan SDM di bidang statistik dan persandian untuk personil fungsional sandiman yang berlatar belakang pendidikan TIK dan Penambahan Anggaran					
Jumlah sistem elektronik yang sudah dilakukan pengujian kerentanan dan penilaian resiko										5	2														
Jumlah sistem elektronik										461	463														
Jumlah Indikator Program			1	Rata rata capaian kinerja program								43.20	0	1	0										
Jumlah IKPD			1	Rata rata capaian kinerja Bidang persandian								43.20	0	1	0										
JUMLAH INDIKATOR SASARAN PD			2	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SASARAN PERANGKAT DAERAH								100.00	2	0	0										
JUMLAH INDIKATOR PROGRAM PD			9	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM PERANGKAT DAERAH								71.20	2	6	1										
JML SEMUA INDIKATOR			11	RATA-RATA CAPAIAN PERANGKAT DAERAH								85.60	4	6	1										

Keterangan :

- 100 % = Telah Tercapai (TT)
- 40,00 - 99,99 % = Akan Tercapai (AT)
- 0 - 39,99 % = Upaya Keras (UK)

Temanggung, 11 Februari 2021
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TEMANGGUNG

SAMSUL HADI, S.Sos., M.T
Pembina Tk. I
NIP. 196606051986071002